

SKRIPSI

**ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAJENE**

*(ANALYSIS OF THE REPORT ON THE REALISATION OF THE REGIONAL
REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET IN THE REGIONAL
GEVERNMENT OF THE MAJENE DISTRICT)*



NURFADILAH JALALUDDIN

C02 19 360

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT MAJENE
2023**

**ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAJENE**

*(ANALYSIS OF THE REPORT ON THE REALISATION OF THE REGIONAL
REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET IN THE REGIONAL
GOVERNMENT OF THE MAJENE DISTRICT)*



Nurfadilah Jalaluddin

C0219360

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat
Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

(Taufik Hidayat B. Tahawa, SE., M.Ak)

NIP : 19930820 201903 1 016

Pembimbing II

(Sufyan Amirullah, SE., M.Ak)

NIDN : 0022029304

Menyetujui,

Koordinator Program Studi Akuntansi



(Nuraeni M. S.Pd., M.Ak)

NIP : 198312032019032006

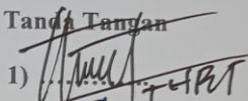
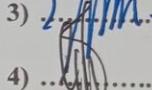
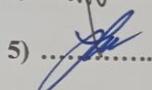
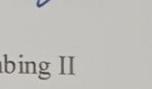
**ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAJENE**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

NURFADILAH JALALUDDIN
C02 19 360

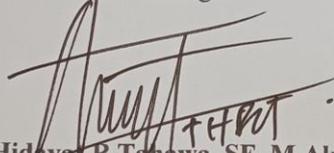
Telah diuji dan diterima panitia ujian
Pada tanggal 12 Oktober 2023 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Taufik Hidayat B.Tahawa, SE., M.Ak	Ketua	1) 
2. Sufyan Amirullah, S.E., M.Ak	Sekretaris	2) 
3. Jumardi, SE., M.Si	Anggota	3) 
4. Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak	Anggota	4) 
5. Muhammad Ihsan Ansari SE., M.Ak	Anggota	5) 

Telah disetujui Oleh:

Pembimbing I



Taufik Hidayat B.Tahawa, SE., M.Ak
NIP. 19930820 201903 1 016

Pembimbing II



Sufyan Amirullah, S.E., M.Ak
NIDN. 0022029304

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Dra. Enny Radijab, M.AB
NIP. 19670325 199403 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurfadilah Jalaluddin

Nim : C0219360

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATENMAJENE

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003. Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Majene, 19 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Nurfadilah Jalaluddin
Nurfadilah Jalaluddin
NIM: C0219360

ABSTRAK

Nurfadilah Jalaluddin, Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene, dibimbing oleh Bapak Taufik Hidayat B.Tahawa, SE.,M.Ak, dan Bapak Sufyan Amirullah, S.E.,M.Ak..

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Majene. Metode analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik dokumenter, survey dan observasi. Lokasi penelitian dilaksanakan di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majene yang berlokasi di jalan Gatot Subroto Nomor 45, Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene populasi dalam penelitian ini adalah 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2018-2022, sampel yang mewakili populasi ialah dari tahun 2020-2022, teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan Rumus Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi.

Hasil dari penelitian yang dilakukan di mengenai Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), menunjukkan bahwa kinerja pendapatan belum mencapai target tiap tahunnya presentasi menurun. Sedangkan kinerja belanja pemerintah daerah Kabupaten Majene dinilai cukup mampu menghemat anggaran belanja.

Kata Kunci: Laporan Realisasi Anggaran, Efektifitas Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah.

ABSTRACT

Nurfadilah Jalaluddin, *Analysis Of The Report On The Realisation Of The Regional Revenue And Expenditure Budget In The Regional Government Of The Majene District, supervised by Mr. Taufik Hidayat B.Tahawa, SE.,M.Ak, and Mr. Sufyan Amirullah, S.E.,M.Ak..*

This study aims to determine the extent to which the level of effectiveness and efficiency of the realization of the regional revenue and expenditure budget in the district government. Majene, the analytical method used is a quantitative descriptive method using data collection techniques, namely documentary techniques, surveys and observations. The research location was carried out at the Majene Regency Regional Financial and Asset Agency which is located on Jalan Gatot Subroto Number 45, Pangali-ali, Banggae District, Majene Regency. The population in this study is the last 5 years, namely from 2018-2022, the sample representing the population is from 2020-2022, the data analysis technique used is to use the Effectiveness Ratio and Efficiency Ratio Formulas.

The results of the research conducted on the Analysis of the Realization Report of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), show that revenue performance has not reached the target every year the percentage declines. Meanwhile, the expenditure performance of the regional government of Majene Regency is considered quite capable of saving the expenditure budget. This can be seen from the presentation each year decreased.

Keywords: *Budget Realization Report, Regional Revenue Effectiveness and Expenditure Efficiency*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran adalah salah satu komponen utama pelaksanaan rencana atau agenda. Perencanaan yang matang diperlukan untuk mencapai tujuan rencana sebelum dapat direalisasikan. Salah satunya adalah anggaran. Di dalam pemerintahan dan sektor publik, anggaran merupakan alat untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Penganggaran dalam lingkungan sektor publik merupakan suatu hal yang kompleks dibandingkan dengan sektor swasta yang tujuan utamanya adalah untuk mencari keuntungan atau keuntungan, dimana penganggaran merupakan urusan rahasia tetapi hal ini tidak berlaku untuk apa yang sudah disusun dalam sektor publik Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat untuk dapat dievaluasi dan diperbaiki dalam jangka waktu yang akan datang sehingga pemerintah dapat melakukan reformasi di bidang administrasi publik, termasuk sistem anggaran, dengan transparansi yang demikian. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dian Natalia mengko 2022:63).

Penyusunan perencanaan diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh proses penyusunan APBD dapat mencerminkan latar belakang pengambilan keputusan sebanyak mungkin, termasuk menentukan arah kebijakan secara keseluruhan, rentang prioritas, menentukan alokasi dan

alokasi sumber daya, dll. Melibatkan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang ekonomis, efektif dan efisien Menggunakan belanja daerah dengan output dan pendapatan yang jelas sesuai prioritas pembangunan sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat luas. Dalam line-item budget, tidak ada ukuran pengeluaran yang jelas, dan jumlah pengeluaran terbatas pada penambahan dan pengurangan anggaran berdasarkan anggaran tahun sebelumnya. Tidak ada standar biaya yang jelas, yang menyebabkan buruknya objektivitas anggaran dan mudah dimanipulasi.

Pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk organisasi sektor publik yang bertanggung jawab untuk mengatur jalannya pemerintahan di daerah, karena sektor publik pemerintah daerah harus memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, termasuk mengelola keuangan daerah dan menggunakan hasil pengelolaan untuk memaksimalkan potensi yang ada. dan mendorong pembangunan daerah. Untuk dapat menjalankan perannya, daerah diberi kekuasaan seluas-luasnya, sekaligus diberi hak dan kewajiban untuk menjalankan otonomi daerah dalam satu kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. (Rusdi, 2018:2).

Dengan adanya desentralisasi pemerintahan daerah dan tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas, maka pemerintah harus menyelenggarakan sistem pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan

kinerja perekonomian, efektif, efisien, tertib, dan akuntabel. Perencanaan berdasarkan penganggaran kinerja yang diprioritaskan terkait erat dengan visi, misi, dan rencana strategis yang ingin dicapai agar hasil (outcome) yang dicapai mencerminkan visi dan misi organisasi. Penganggaran berbasis kinerja mencakup indikator kinerja, standar biaya, dan ukuran kinerja. Ketiganya adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi masukan, keluaran dan hasil dari program berbasis kinerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Jika kinerja yang efektif dan efisien tercapai, akuntabilitas kinerja ditetapkan, yang merupakan visi semua organisasi sektor publik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dien et al, (2015:534) menemukan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap efektif dan efisien penggunaan anggaran keuangan. Hal ini ditunjukkan bahwa semakin efektif dan efisiennya penggunaan anggaran dan belanja daerah maka kinerja keuangan daerah pun semakin tinggi peningkatan kerjanya. Sedangkan peneliti yang lain menemukan bahwa kinerja pendapatan belum efektif hal ini terlihat dari lebih kecilnya jumlah yang terealisasi dengan yang dianggarkan. Adapun dengan kinerja belanja pada pemerintah daerah sudah efektif hal ini didukung dengan kecilnya anggaran belanja yang terealisasi dari yang telah dianggarkan. Sehingga pemerintah daerah harus melakukan penghematan dan melakukan peningkatan PAD dan disertai dengan penghematan belanja (Maechelino Daling, 2013:82).

Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi yang sangat berguna untuk menilai kinerja keuangan. Tentara Perlawanan Tuhan menempati prioritas yang lebih tinggi daripada neraca. LRA adalah jenis laporan keuangan yang dibuat terlebih dahulu sebelum menyiapkan neraca, laporan operasi, dan laporan arus kas. Anggaran memainkan peran penting sebagai alat untuk stabilisasi, alokasi alokasi, sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi, dan evaluasi kinerja. Dengan demikian, LRA adalah salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan yang paling penting. Berdasarkan LRA, pembaca laporan dapat menganalisis kinerja laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis pengeluaran, dan analisis pembiayaan. Selalu ada unsur perkiraan (asumsi) saat merumuskan anggaran, dan terkadang perkiraan ini berbeda dengan yang direalisasikan dalam pelaksanaan anggaran. (Jessy langi,2022, hal 179).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakekatnya merupakan alat kebijakan yang sangat penting, alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berupaya untuk transparan dan akuntabel dalam meningkatkan kinerjanya agar dapat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Efektivitas pada dasarnya berkaitan dengan pencapaian tujuan atau indikator kebijakan (efektivitas). Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dan tujuan serta apa yang harus dicapai.

Suatu kegiatan usaha dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai sasaran dan tujuan akhir kebijakan (belanja dengan bijak) dan mencapai angka minimal 1 (satu) 100%. Indikator efektif menggambarkan jangkauan konsekuensi dan dampak (*outcome*) dari suatu kegiatan. Mencapai output yang direncanakan dari target program (Juwanda 2021:2). Meskipun pengukuran efektif dilakukan dengan membandingkan antara *output* yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*).

Suatu proses kegiatan usaha dapat dikatakan efisien apabila dapat mencapai suatu produk atau hasil kerja tertentu dengan sumber daya dan dana yang seminimal mungkin (dibelanjakan dengan baik). Oleh karena itu APBD merupakan sarana untuk menampung berbagai kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui kegiatan dan program yang dituangkan melalui pengembangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Majene, karena Pemerintah Daerah Kabupaten Majene merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang melaksanakan Otonomi Daerah, dan pemerintah pusat memberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur keuangannya sendiri, dan memahami apakah Kabupaten Majene daerah Pemerintah melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Disamping itu penelitian tentang APBD pada Kabupaten

Majene masih jarang dilakukan oleh peneliti- peneliti sebelumnya. Hal inilah yang menjadikan peneliti termotivasi untuk dilakukannya penelitian pada pemerintah Kabupaten Majene.

Berikut ini adalah data anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah daerah Kab. Majene.

Tabel 1.1
Laporan Anggaran Pendapatan Dan Realisasinya Pemerintah Daerah
Kabupaten Majene T.A 2018-2022

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisi	Presentasi (%)
2018	878.194.148.447	872.674.394.613	5.519.753.834	99,37
2019	983.101.205.734	974.669.368.168	8.437.873.566	99,14
2020	922.702.412.067	903.348.773.834	19.353.638.233	97,90
2021	914.386.195.572	910.693.466.156	3.692.729.416	99,60
2022	860.139.645.214	792.103.410.722,	68.036.234.492	86,21

Sumber: Data di olah penulis (2023)

Berdasarkan table Laporan Anggaran Pendapatan dan Realisasi menunjukkan presentasi 2018 sebesar 99,37% dengan selisi Rp 5.519.753.834, 2019 menunjukkan 99,14% dengan selisi Rp 8.437.873.566, 2020 sebesar 97,90% dengan selisi Rp 19.353.638.233, 2021 sebesar 99,60% dengan selisi Rp 3.692.729.416 dan pada tahun 2022 sebesar 86,21% dengan selisi Rp 68.036.234.492.

Tabel 1.2
Laporan Anggaran Belanja Dan Realisasinya Pemerintah Daerah
Kabupaten Majene T.A 2018-2022

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisi	Presentasi (%)
2018	909.045.176.320	877.677.794.369	32.367.381.951	97,65
2019	876.257.940.263	856.067.836.668	20.190.103.595	97,70
2020	820.0068.968.180	811.861.853.575	8.145.043.243	99,00
2021	799.525.554.883	762.018.070.175	37.507.484.708	95,31
2022	-	-	-	-

Sumber: Data di olah penulis (2023)

Berdasarkan tabel Laporan Anggaran Belanja dan Realisasi menunjukkan presentasi 2018 sebesar 97,65% dengan selisi Rp 31.367.381.951, 2019 menunjukkan 97,70% dengan selisi Rp 20.190.103.595, 2020 sebesar 99,00 % dengan selisi Rp 8.145.043.243, 2021 sebesar 95,31% dengan selisi Rp3.692.729.416 dan pada tahun 2022 sebesar 86,21% dengan selisi Rp 37.507.484.708.

Berdasarkan fenomena tersebut, apakah dikatakan realisasi laporan keuangannya sudah efektif dan efisien, atau masih terdapat situasi yang kurang tepat dan tidak relevan dalam pengelolaan keuangan, agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengelolaan laporan keuangan, karena hal ini terkait dengan tujuan. dan Menyadari bahwa jika pengelola keuangan efektif, efisiensi yang tinggi berarti proyek dijamin berjalan lancar sesuai rencana. Jika manajemen tidak efisien dan efektif, perlu perbaikan manajemen dan pelaporan keuangan menjadi lebih baik.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan pada pembahasan terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATENMAJENE”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah dibahas dalam latar belakang terdahulu, maka rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah “Sejauh mana tingkat efektif dan efisien pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene”?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan terdahulu, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektif dan efisien Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sumber bacaan atau referensi

yang dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai sumber informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Penulis

Menambah wawasan dan peningkatan kapasitas penulis dalam bidang akuntansi sektor publik khususnya tentang kinerja keuangan pada pemerintah daerah, serta untuk membandingkan teori yang didapat dari studi kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya.

1.4.2.2 Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai tambahan bahan referensi dan bahan masukan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dan alternatif untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah.

1.4.2.3 Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat tentang kinerja keuangan dan tingkat realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah daerah

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teoritik

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

Jamuluddin Mujid (2019: 6) mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi ekonomi (keuangan) dan yang digunakan oleh pemerintah, LSM, dan organisasi lain atau entitas publik. Informasi bagi mereka yang membutuhkannya untuk membuat keputusan ekonomi. Dalam waktu yang relatif singkat, akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini, dibandingkan periode sebelumnya, praktik akuntansi instansi sektor pemerintah, BUMN/BUMD, dan jenis organisasi publik lainnya mendapat perhatian lebih. Masyarakat menempatkan tuntutan yang lebih besar pada transparansi dan akuntabilitas publik dari lembaga sektor publik.

Di dalam pemerintahan, penekanan yang lebih besar diberikan pada penilaian kelangsungan praktik manajemen pemerintah, termasuk kebutuhan untuk meningkatkan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pemantauan dan audit, dan berbagai kebijakan yang secara finansial mempengaruhi implementasi pemerintah. Jika dilihat secara mendalam, akuntansi sektor publik memainkan peran vital dan menjadi topik yang menjadi perhatian para akademisi dan praktisi sektor publik.

Organisasi sektor publik saat ini berada di bawah tekanan untuk menjadi lebih efisien, mengingat biaya ekonomi dan sosial serta dampak negatif dari aktivitas mereka. Persyaratan ini menyebabkan penerimaan cepat akuntansi sebagai ilmu yang diperlukan untuk pengelolaan urusan publik. Akuntansi sektor publik dimulai sebagai kegiatan khusus dalam industri yang relatif kecil. Namun, akuntansi sektor publik saat ini menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan dan substantif (Madiasmo, 2018).

2.1.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Ruang lingkup akuntansi sektor publik mencakup semua instansi pemerintah dan organisasi nirlaba. Akuntansi sektor publik juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi sektor publik. Sektor publik memiliki cakupan yang lebih luas dan kompleks daripada sektor swasta yang lebih sempit. Perluasan ruang lingkup sektor publik tidak semata-mata disebabkan oleh keragaman dan bentuk organisasi di dalamnya, atau dipengaruhi oleh lingkungan kompleks yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut.

Secara kelembagaan, sektor publik meliputi instansi pemerintah, pemerintah pusat dan daerah serta satuan kerja pemerintah, perusahaan publik, BUMN dan BUMD, organisasi dan lembaga, organisasi politik dan massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), departemen kesehatan, perguruan tinggi dan nirlaba. mengatur. lainnya. Bahkan beberapa tugas dan fungsi sektor publik juga dapat dilakukan oleh sektor swasta, seperti tugas

menyediakan berbagai layanan publik, seperti layanan telekomunikasi, perpajakan, pendidikan, transportasi publik, dll. Namun untuk beberapa tugas, keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintah. Dengan demikian, akuntansi sektor publik berbeda dari akuntansi sektor swasta dalam beberapa hal.

2.1.1.2 Value for money

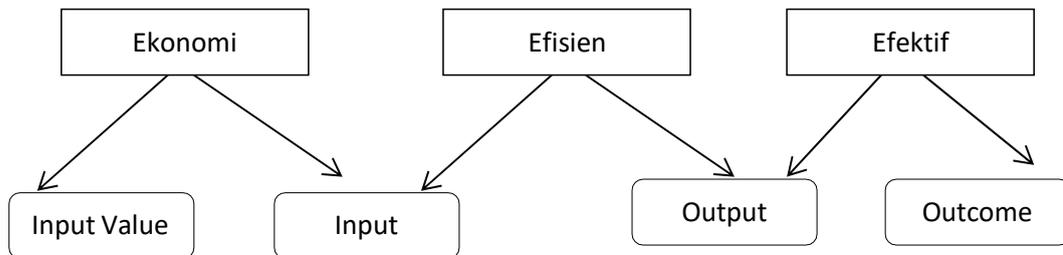
Persyaratan baru telah muncul bagi organisasi sektor publik untuk berfokus pada nilai uang saat melaksanakan aktivitasnya. VFM (*Value for money*) adalah filosofi manajemen organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga unsur utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo, 2018).

Perekonomian didasarkan pada perolehan masukan (input) dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah. perekonomian adalah perbandingan antara masukan (apa yang terjadi) dan nilai masukan (apa yang seharusnya terjadi). Ekonomi terkait dengan sejauh mana lembaga sektor publik meminimalkan penggunaan sumber daya dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif (Mardiasmo, 2018).

Efisiensi mengacu pada perolehan output maksimum dengan input tertentu, atau menggunakan input minimum untuk mencapai output atau input (output/input) terkait dengan standar atau tujuan kinerja yang telah ditentukan sebelumnya (Mardiasmo, 2018).

Efektivitas mengacu pada tingkat pencapaian hasil yang direncanakan untuk sekadar menetapkan tujuan, dan efektivitas adalah perbandingan hasil dengan keluaran (Madiasmo, 2018). Ketiga hal tersebut merupakan unsur utama VFM dengan tambahan dua unsur lainnya yaitu fairness dan fairness atau kesetaraan. Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial (*social opportunity*) yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan, perlu dilakukan distribusi secara merata (*equality*). Penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata.

Gambar 2.1
Gambar Value For Money Secara Skematis



Sumber: (Madiasmo,2018)

2.1.2 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

2.1.2.1 Pengertian APBD

Rencana keuangan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditentukan dengan peraturan daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

yang mengatur tentang pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun terhitung tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dengan demikian, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi ini menjadikan APBD penting karena kegiatan pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan jika tidak dicantumkan dalam APBD (Habiburrahman, 2016).

Menurut siregar, dkk (2013) Anggaran adalah rencana manajemen yang tertulis dan dinyatakan dalam satuan rupiah. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 atas Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.1.2.2 Fungsi APBD

Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggara pemerintah dan kemampuan pembiayaan daerah. Penyusunan APBD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara (Jamuluddin, 2019).

Fungsi APBD menurut (PP No. 12 Tahun 2019) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:

1. Otoritas

Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

2. Perencanaan

Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Pengawasan

Anggaran daerah menjadi pedoman untuk meneliti apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Alokasi

Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Distribusi

Daerah harus mengandung arti/memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

6. Stabilisasi

Anggaran daerah harus mengandung arti/harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

2.1.2.3 Proses Penyusunan dan Penetapan APBD

Menurut (permendagri No 58 tahun 2015) Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah, penyusunan rancangan APBD berpedoman pada rencana pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan Negara. Dalam hal anggaran yang diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam peraturan daerah, sebaliknya, anggaran yang diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam peraturan daerah.

Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun berikut sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD. Pemerintah daerah membahas bersama DPRD prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja perangkat daerah.

Dalam rangka penyusunan RAPBD, kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun berikutnya berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD (Rusdi,2018).

Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan APBD tahun berikutnya. Pemerintah daerah mengajukan rancangan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun selanjutnya.

Pembahasan rancangan APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD. DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan APBD. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBD yang disetujui oleh DPRD terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Jika DPRD tidak menyetujui rancangan peraturan daerah untuk membiayai keperluan setiap bulan, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar APBD tahun anggaran sebelumnya (Rusdi,2018).

2.1.3 Laporan Keuangan Daerah

Menurut Jamaluddin (2019) diungkapkan, “Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan”.

Pengertian laporan keuangan menurut peraturan menteri keuangan, “laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan”.

Dari kedua pernyataan diatas, dilihat adanya perbedaan pada komponen laporan keuangan. Pada laporan keuangan non konvensional terdapat laporan yang dinamakan laporan laba rugi, laporan tersebut berfungsi sebagai tolak ukur kinerja perusahaan, sedangkan pada laporan keuangan pemerintah pusat tidak terdapat laporan laba rugi, hal ini dikarenakan pemerintah tidak berorientasi pada profit, tetapi didalam laporan keuangan kementrian Negara/ lembaga ada laporan yang memperlihatkan jumlah anggaran yang diotorisasikan dengan realisasinya, laporan ini disebut realisasi anggaran. Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang sangat penting untuk mengetahui dan menganalisa keadaan dari suatu perusahaan dan dari hasil analisa disebut dapat diperoleh keputusan yang tepat.

2.1.4 Laporan Realisasi Anggaran

2.1.4.1 Defenisi Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Riska (2020:15) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan laporan mengenai perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasi dalam satu tahun anggaran.

Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Bagaimanapun juga jelas mengungkapkan apa yang akan dilakukan dimasa mendatang.

2.1.4.2 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Adapun tujuan penyusunan laporan realisasi anggaran yaitu membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah, membantu menciptakan efisien dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan dan memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas dalam belanja.

2.1.4.3 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Adapun manfaat penyusunan laporan realisasi anggaran menurut, (standar akuntansi pemerintah 2007:85) yaitu, dalam laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Informasi tersebut berguna bagi

para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif (Rusdi,2018).

2.1.5 Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 (2006:5), Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan dan program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur.

Pada dasarnya pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu (a) untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, (b) untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan dan (c) untuk mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Riharjo,2017)

2.1.6 Analisis Pendapatan Dan Belanja Daerah

Analisis terhadap kinerja pendapatan dan belanja daerah secara umum terlihat dari realisasi anggaran dan pendapatan belanja daerah. Apabila realisasi melampaui anggaran maka kinerja dapat dinilai dengan

baik (Emu,2018). Menurut Susitiyanto (2019) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dibedakan dua bagian Kinerja Pendapatan Daerah dan Kinerja Belanja Daerah, yaitu :

2.1.6.1 Analisis Kinerja Pendapatan Daerah

Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dapat terlihat dari realisasi pendapatan dan anggaran. Apabila realisasi melebihi anggaran yang telah dibuat maka kinerja pemerintah daerah dinilai baik. Berdasarkan realisasi anggaran, dapat dilakukan Analisis Kinerja Pendapatan Daerah menurut Mahmudi (2016)dengan beberapa cara :

1. Analisis varians
2. Pertumbuhan Pendapatan Daerah
 - a. Pertumbuhan Pendapatan Daerah
 - b. Pertumbuhan Pajak Daerah
 - c. Pertumbuhan Retribusi Daerah
 - d. Pertumbuhan Pendapatan transfer
3. Menghitung Rasio Keuangan
 - a. Rasio Kemandirian Daerah
 - b. Rasio Ketergantungan Daerah
 - c. Derajat Desentralisasi
 - d. Rasio Efektifitas PAD
 - e. Rasio Efisiensi PAD

- f. Rasio Efektifitas Pajak Daerah
- g. Rasio Efisiensi Pajak Daerah
- h. Derajat Kontribusi BUMD
- i. Rasio Kemampuan Mengembalikan Pinjaman
- j. Rasio Hutang Terhadap Pendapatan

Berdasarkan dari banyak cara diatas, beberapa dapat dijelaskan sebagaiberikut (Suliastono,2019):

1. Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode satu ke periode berikutnya, baik dilihat dari sumber pendapatan maupun pengeluaran.

2. Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Dihitung dengan cara membandingkan jumlah Pendapatan Transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.

4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan total jumlah pendapatan. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

2.1.6.2 Analisis Kinerja Belanja Daerah

Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah dilakukan untuk mengevaluasi apakah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif. Kinerja Keuangan Belanja Daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan. Menurut Mahmudi (2016), Analisis Kinerja Belanja Daerah dapat dilakukan dengan cara:

1. Analisis Varians Belanja
2. Analisis Pertumbuhan Belanja
3. Analisis Keserasian Belanja
4. Rasio Efisiensi Belanja
5. Rasio Belanja Terhadap PDRB

Berdasarkan dari banyak cara diatas, beberapa dapat dijelaskan sebagai berikut (Suliastono,2019) :

1. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja

memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Analisis Pertumbuhan Belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Analisis Keserasian Belanja Daerah

Analisis Keserasian Belanja Daerah menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal. Hal ini terkait anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Supaya fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, makapemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Analisis KeserasianBelanja Daerah antara lain berupa :

a. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Rasio ini memberi informasi mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi adalah belanja yang manfaatnya dapat habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran. Pada umumnya, pemerintah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung akan memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah dengan pendapatan rendah. Penyebabnya adalah pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi biasanya telah memiliki aset modal yang mencukupi sehingga pemerintah daerah tersebut cenderung melakukan belanja yang bersifat jangka pendek.

b. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui proporsi Belanja Daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal dalam tahun anggaran bersangkutan. Sifat dari belanja ini adalah jangka menengah dan panjang, selain itu belanja modal tidak rutin. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan rendah biasanya akan memiliki proporsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi. Penyebab terjadinya adalah pemerintah daerah yang memiliki tingkat pendapatan rendah akan berorientasi untuk melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang kemudian menjadi referensi yang relevan dengan penelitian ini antarlain dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Hasanah, Elok,Dwi Vidiyastutik/ JURNAL ECOBUSS Vol. 6 No 2 (2018)	Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Dalam Belanja Daerah Pemerintah Probolinggo	Perhitungan rasio efisiensi belanja dari Tahun 2013 sampai dengan 2017 yaitu sebesar 89,55%, 85,73%, 80,89%, 80,75%, 82,08%. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan penghematan dari total anggaran yang telah dianggarkan.	Teknik analisis datanya sama yaitu rasio efektif, rasio efesien dan sama sama menggunakan metode deskriptif kuantitatif.	Perbedaan dari penelitian terletak di bagian metode analisis data. Di jurnal ini membahasa beberapa analisis data
2.	Musa Nurwahid Kifli1, Adriyanti Agustina Putri2, Linda Hetri Suriyanti/	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan	Berdasarkan analisis rasio ekonomis, selama empat tahun terakhir persentase yang dicapai UMRI mengalami	Persamaan dari penelitian terdahulu ini yaitu sama sama membicara kan tentang	Perbedaan nya yaitu penelitian terdahulu ini menjelaskan tentang rasio

	Jurnal Pendidikan tambusai Vol 6 No. 2 (2022)	Pada Universitas Muhammadiyah Riau	fluktuatif atau keadaan berubah-ubah dengan rata-rata persentase yaitu senilai 95,5% dan dikategorikan ekonomis.	laporan realisasi anggaran pendapatan Teknik analisis datanya sama yaitu rasio efektif, rasio efisien.	ekonomis.
3.	Habiburrahman/ Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol. 6 No. 2 (2016)	Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Bandar Lampung	Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu dapat disimpulkan bahwa hasilnya yaitu: (1) Rasio kemandirian daerah berada pada pola konsultatif, rata-rata rasio kemandirian Kota Bandar Lampung tahun anggaran tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mendapat angka sebesar 27,26%.	Teknik analisis datanya sama yaitu rasio efektif, rasio efisien dan sama sama menggunakan metode deskriptif kuantitatif.	Perbedaan yaitu berada di teknis analisis sama sama menggunakan rasio efektifitas dan efisiensi tetapi penelitian ini menghitung pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah
4.	Mustika Hapsari, Endang Winarsih, Santosa Tri Prabawa/Jurnal STIE Wijaya Mulya Surakarta	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pada Pemda Kota Surakarta Di Era Pandemi Covid-19	Hasil penelitian yaitu kinerja keuangan pemda kota Surakarta pada tahun 2019 (sebelum pandemi Covid-19) dinilai sudah efektif namun kurang efisien .	Persamaan Teknik analisis datanya sama yaitu rasio efektif, rasio efisien dan sama sama menggunakan metode	Perbedaan dari penelitian terletak di lokasi tempat penelitiannya

				deskriptif kuantitatif.	
5.	Ruliaty, Ismail Badollahi, A Indah Nurfadillah/ Jurnal Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Vol 1 No 1 (2019)	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone	Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya tergolong tidak efektif dan tergolong efisien	Persamaan dari penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas efektivitas PAD dan efisien Belanja	Perbedaan dari penelitian terletak metode analisis data.

Sumber: Data di olah penulis (2023)

2.3 Kerangka Konseptual

Dalam Penelitian Ini, Penulis Meneliti Tentang Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dan pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai pendapatan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Serta belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat kualitas berupa efektif dan efisien atau kinerja perencanaan program yang telah dicapai, dengan menggunakan rasio keuangan yaitu rasio efektif pendapatan

dan efisien belanja yaitu untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam merealisasikan APBD yang ada dengan jumlah dan waktu yang tepat dan rasio efisien belanja yaitu untuk mengukur tingkat penghematan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka digunakan alur dari kerangka konsep penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual



Sumber: Data di olah penulis (2023)

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu anggapan teoritis yang dapat dipertegas. Hipotesisi merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan

(Sugiyono,2015:63). Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten majene dengan efektif dan efisien laporan realisasi kabupaten Majene.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Makka, Harry., David P.E.Saerang, Inggriani Elim. 2015. Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Di Kota Kotamobagu. *Jurnal Berkala Imiah Efisiensi*. Vol.15 No.04.
- Belinda,P. & Costari,N. 2021. Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unit*, 1(1), 61.
- Daling, Marcheno. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal EMBA*. Vol.1 No.3.
- Dian,2022,Pelaporan Realisasi Anggaran Pada Aplikasi Epra Di Kabupaten Minahasa,Si Batik Journal, 2 (1),63-64
- Ekasari, Ratna. *Model Efektifitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. Malang: AE Publishing, 2020.
- Habiburrahman, 2016, Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Bandar Lampung, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 6 (2),121- 126
- Hansen & women 2013. *Managemen accounting*. Edisi ketujuh. Jakarta: Salemba Empat.
- Hapsari dkk. 2022. Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pada Pemda Kota Surakarta Di Era Pandemi Covid-19. *Edunomika*. 2 (6). 5-6.
- Langi Dkk, 2022, Implementasi Laporan Anggaran Dan Realisasi Belanja Negara Pada Universitas Negeri Manado, Yame: *Journal Of Management*, 5 (2), 179.
- Majid, Jamaluddin. *Akuntansi Sektor Publik*. Gowa: Pusaka Almaida, 2019.

- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor publik*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Patarali, Muhammad Idris. *Kinerja Keuangan Daerah*. Makassar: DELA MACCA, 2016.
- Riska. 2020. “ Analisis Kinerja Belnja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo”. Skripsi.Makassar: Universitas Muhammadiyah.
- Rusdi. 2018. Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Siregar,B. Suropto,B. Hapsoro,D. Widodo, E. Herawati,E. Kusumasari,E. Nurofik,N. 2013. *Akuntansi Biaya* edisi 2. Yogyakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&K*. Bandung: Alfabeta.
- Suliastono.2019. Analisis Kinerja Pendapatan Dan Belanja Daerah. Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Kabupaten Boyolali
- Tulangow, A.P., T. Runtu. 2016. Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa. Jurnal EMBA. Vol.4 No.3
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurfadilah Jalaluddin, lahir di Pamboang, 19 November 2001. Anak pertama dari 3 bersaudara pasangan Jalaluddin Tajieb dan Suriani Paraja. Alamat rumah Lingkungan Pakkola Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. Penulis menempuh pendidikan di TK Perwanida 3 Saleppa pada tahun 2006 selesai pada tahun 2008, Kemudian melanjutkan sekolah dasar di SDN 24 Inpres Saleppa pada tahun 2008 selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan sekolah di SMPN 3 Majene pada tahun 2013 selesai pada tahun 2016, kemudian melanjutkan sekolah menengah kejuruan di SMK Negeri 2 Majene pada tahun 2016 penulis mengambil jurusan akuntansi dan selesai pada tahun 2019, penulis memilih untuk melanjutkan pendidikan pada program S1 di Universitas Sulawesi Barat mengambil jurusan akuntansi fakultas ekonomi, pada semester VIII tahun 2022 penulis melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di kelurahan baruga, lingkungan baruga barat kecamatan banggae timur kabupaten Majene selama 40 hari, penulis melaksanakan seminar proposal pada tanggal 15 Mei 2023 dan berhasil mengikuti ujian tutup pada tanggal 12 Oktober 2023.

Berkat rahmat, ridho, petunjuk, dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai doa dan dukungan dari orangtua dan kakak-kakak dan adek-adekku dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan tinggi Universitas Sulawesi Barat. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene”.